

## Cyber Law: Rights and Obligations

### Transkrip

### UI101 Minggu 4: e-Government – Part 1

Video 1: Evolusi e-Government - Part 1

Video 2: Evolusi e-Government - Part 2

Video 3: Faktor Pendorong dan Urgensi e-Government

Video 4: Fungsi dan Tujuan e-Government

Video 5: Tantangan e-Government Indonesia

Video 6: Penerapan e-Government di Luar Negeri

#### Video 1: Evolusi e-Government - Part 1

Pemirsa IndonesiaX, kali ini kita bicara tentang electronic government. Kemarin kita sudah berbicara tentang konstitusi dan teknologi informasi. Selain bicara tentang perlindungan HAM, kali ini kita akan bicara kewajiban konstitusi pemerintah untuk penyelenggaraan sistem elektronik demi kepentingan masyarakat.

Dua hal yang akan menjadi perhatian tentunya, tentang pelayanan publiknya, dan juga untuk mendukung administrasi pemerintahan. Electronic government secara umum didefinisikan adalah pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan juga pelayanan publik. Bahkan bukan hanya itu, penyampaian informasi publiknya juga harus diperhatikan.

Pemirsa IndonesiaX, definisi dari berbagai ahli tentu banyak sekali. Tetapi intinya adalah bagaimana kita menyediakan sistem elektronik untuk mendukung administrasi pemerintahan, informasi publik dan pelayanan publik.

Kalau kita artikan dalam konteks ke-Indonesia-an, intinya adalah bagaimana menghadirkan negara kepada kepentingan rakyat dan bangsanya dengan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjalankan semua kebutuhan publik tersebut, menjawab kebutuhan publik tersebut secara elektronik.

Intinya adalah efisiensi dan ketersediaan dari sistem elektronik itu untuk menjawab kebutuhan publiknya. Lebih lanjut kita akan bahas bagaimana evolusinya. Pada intinya, electronic government, jika diambil pokok-pokoknya saja, setidaknya-tidaknya tiga fase yang akan terlihat. Pertama adalah, fase untuk publikasi saja, yaitu penyampaian informasi pada web. Kita cuma melihat, kemudian membacanya, men-download-nya, itu sudah masuk kepada tahapan yang mulai arah kedua. Terjadi interaksi dengan situs tersebut. Ada komentar, itu kita sudah masuk dalam proses interaksi. Jadi pertama, publish saja. Yang kedua, mulai ada interaksi antara recipient, si pembaca tadi, dengan si pengelola web sehingga akibatnya kita bisa memberikan komen dan dibaca lagi, kita memberikan complain, kemudian ditindaklanjuti.

Dan yang berikutnya, ada transactional. Transactional posisinya sudah lebih dari sekadar interaksi. Yaitu sudah ada fungsi pelayanan publik yang diberikan kepada si masyarakat. Dalam artian, kalau saya menggunakan situs pajak, artinya saya ingin berinteraksi, melakukan kewajiban saya sebagai warga negara membayar pajak, dan pajak menindaklanjuti dari semua laporan tadi. Jadi sifatnya transactional.

Artinya sudah terjadi suatu perbuatan hukum akibat dari penggunaan sistem elektronik itu. Baik dalam mengurus perijinan, mengurus misalnya, tentang perpajakan dan lain sebagainya, hal-hal yang serupa dengan itu.

Jadi kita ulang, kita garis bawahi. Pada intinya, tiga hal pokok dalam pengembangan sistem elektronik untuk pemerintahan. Satu, hanya sekedar publikasi informasi. Yang tahapan kedua, sudah mulai terjadi interaksi dan yang ketiga, sudah mulai terjadi transaksi. Dalam konteks berpikir itu, sebagaimana telah saya jelaskan di muka, ada bentuk transformasi dari administrasi pemerintahan secara internal dan eksternal, dalam bentuk pelayanan publiknya. Tidak hanya dalam konteks, menyampaikan informasi publik, tapi dalam pelayanan pemerintahan, dalam menjawab kebutuhan publik.

Selanjutnya kita akan lihat evolusi dari tiga hal ini. Berbanding lurus dengan tiga tahapan tadi, publikasi, interaksi, dan transaksi; ada beberapa teori yang akan menguraikan tentang evolusinya. Tapi setidaknya-setidaknya secara umum akan terlihat lima. Pertama adalah Emerging Presence, Enhanced Presence, Interactional Presence, Transactional Presence, dan Networking Presence.

Jadi lima hal. Otomatis kita akan bicara Emerging Presence, bagaimana yang tadinya informasi tidak diketahui oleh publik menjadi informasi publik yang dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat. Maximum access, limited exemption. Poin pentingnya adalah bagaimana pemerintah, penyelenggara negara, semua yang berkaitan dengan penyelenggara publik menyampaikan informasi publik.

Lalu yang kedua, adalah terjadinya interaksi. Dalam poin penting, dari informasi-informasi tadi, dapat dipercaya dan dapat melakukan sesuatu. Yang berikutnya lagi, langkahnya adalah selain interaksi, transactional. Dengan terjadinya transactional, maka terjadi hubungan yang lebih harmonis dan lebih efisien tentunya, antara G to G, atau Government to Government, Government to Citizen dan Government to Business. Government to Business, kita akan mengatakannya itu adalah proses pengadaan barang dan jasa. Kalau Government to Citizen, pelayanan administrasi negara.

Jadi lima hal yang kita lihat tadi itu perlu menjadi perhatian kita terkait dengan evolusi e-government. Lebih lanjut kita bahas dalam materi berikutnya.

## Video 2: Evolusi e-Government – Part 2

Lima langkah tadi, kalau kita uraikan satu per satu sebagaimana saya sebutkan sebelumnya; Emerging Presence, Enhanced Presence, Interactional Presence, Transactional Presence, dan Network. Dalam konteks Emerging, itu berpikirnya adalah informasi yang dibutuhkan, apa saja yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Penyajian-penyajian informasi, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.

Lalu yang kedua, kita bicara sudah Enhanced, artinya itu informasi harus lebih naik lagi penyajian mutunya. Poin pentingnya adalah pemerintah lebih meningkatkan yang namanya keotentikan dari informasi publik itu, berikut dokumen publiknya.

Yang berikutnya adalah kita bicara tentang transactional, oh, interactional dulu sebelum transactional. Interaksi berarti sudah mulai ada kegiatan-kegiatan yang lebih bagus lagi dari kegiatan hubungan antara Government to Citizen dan Government to Business-nya. Dan yang selanjutnya, transaksi. Berarti sudah terjadi pelayanan publik, telah terjadi perbuatan hukum, hubungan komunikasi yang lebih transaksional antara warga negara dengan pemerintahnya.

Dan yang terakhir bicara soal networking, di sini sudah mulai terjadi transformasi yang lebih baik, dari penerapan ICT itu. Bukan hanya sebagai pembuat hubungan komunikasi menjadi lebih efisien dan available, telah terjadi suatu bentuk interaksi antara warga negara dengan negaranya, dalam hubungan yang lebih interaktif lagi secara elektronik. Yang dimaksudkan seperti ini, dengan adanya network presence, maka saya, sebagai individu pengakses e-government, mendapatkan semua layanan-layanan itu dan lalu saya bisa berinteraksi, memberikan tanggapan, saya melakukan perbuatan hukumnya, dan semua penyelenggara negara akan dapat berubah dari masukan-masukan itu.

Jadi bukan IT-enabled, tapi dia sudah menjadi empowering, terjadinya suatu sistem pemerintahan yang seakan-akan itu dapat terselenggara secara elektronik antara pemerintahnya, bisnisnya, dan masyarakatnya. Ingat, pemerintahan modern itu meletakkan antara pemeranan pemerintah, kesertaan masyarakat, dan pelaku usaha dalam posisi yang seimbang. Dimana berpikir government, yang tadinya sangat struktural hierarkis menjadi fungsional dinamis.

Artinya, coba kita lihat perkembangan sekarang. Definisi badan publik saja, itu tidak hanya pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik tetapi perusahaan-perusahaan yang terkait dengan barang publik, jasa publik, dia juga menyelenggarakan pelayanan publik. Itu artinya secara administrasi negara, dari pendekatan negara yang sangat struktural hierarkis dijalankan oleh pejabat negara, menyelenggarakan kesejahteraan umum, kini berubah menjadi masyarakat yang harusnya juga mampu menyejahterakan dirinya. Atau disebut juga kesertaan masyarakat madani yang lebih kuat. Pelaku usaha, masyarakat madani, itu para NGO dan pemerintah, tiga serangkai dalam penentu dinamika negara hukum modern. Kita bahas lagi dalam materi berikutnya.

### Video 3: Faktor Pendorong dan Urgensi e-Government

Secara historis, kalau kita lihat electronic government, maka juga kita tidak dapat melepaskan diri dari fungsi administrasi negara itu. Dalam materi sebelumnya, saya telah sampaikan, telah berubah pendekatan administrasi negara dari yang struktural hierarkis dimana kewajiban negara menyejahterakan seakan-seakan hanya dijalankan oleh administrasi negara, telah berubah menjadi kesertaan masyarakat. Partisipasi masyarakat dan desakan untuk mengefisienkan pemerintah.

Setidak-tidaknya kita akan berpikir, kenapa fenomenanya jadi begini? Pemerintah, intinya adalah menjawab kebutuhan masyarakatnya. Kenapa dibentuk pemerintah? Untuk memajukan kesejahteraan rakyatnya, melindungi segenap bangsanya, dan otomatis mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau administrasi pemerintahan itu mahal karena terlalu berkembang, terlalu banyak aparturnya, terlalu besar organisasinya, maka dengan sendirinya, desakannya adalah kalau kita ingin berkompetisi menyejahterakan dari sumber daya kita, menjadi kesejahteraan kita, otomatis reformasi birokrasi menjadi penting.

Dengan kata lain, desakan yang dari globalisasi terhadap keberadaan pemerintah yang efisien dan efektif, mau tidak mau meminta adanya re-inventing to the government bureaucracy. Demokrasi dirampingkan, diefektifkan, berarti pemberdayaan para aparatur negara yang cerdas, gaji yang pantas, dan kemudian terwujudlah birokrasi yang berharkat dan efisien menjawab kebutuhan masyarakatnya.

Fenomena globalisasi mendorong terjadinya kompetisi antar pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui, desakan pertama biasanya akan dikatakan Open Gov, informasi dibuka. Sehingga akan menarik investasi asing dan masyarakatnya juga

mempunyai pemerintahan yang lebih akuntabel. Transparan, akibat keberadaan sistem elektronik itu.

Globalisasi telah mendorong bentuk pemerintahan yang makin efisien dan efektif. Efisien berarti pendekatannya dana. Anggaran yang besar untuk menyelenggarakan negara, itu berarti secara administrasi kita punya PR besar untuk merampingkan karena dia harusnya berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan kepada publiknya. Jadi kalau kita mengatakan ada cost perizinan, sekian x, itu sebenarnya berbanding lurus dengan seberapa rumit pemerintah mengurusinya itu.

Saya bayar pajak sekian, logika matematikanya, saya akan bisa menyumbang negara untuk menyelenggarakan urusan, sekian urusan. Artinya akan berbanding lurus, kewajiban warga negara dengan kesejahteraan yang akan dia capai nantinya. Walaupun Undang-undang Perpajakan menyatakan itu adalah kewajiban warga negara. Tapi ingat, tugas konstitusi pemerintah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, selain turut serta melaksanakan ketertiban dunia.

Kita tidak berperang, tetapi kan kita harus sejahtera. Berpikirnya masyarakat berarti kan simpelnya begini. Ada harta di bawah tanah kita ini yang namanya sumber daya alam, berkembangnya populasi sebagai warga negara, kita harus sejahtera di atas negara sejahtera. Bukan kita menjadi negara miskin di atas karunia alam yang sejahtera.

Electronic government mendorong transformasi pemerintahan kita menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Jadi secara globalisasi, desakannya adalah keterbukaan, akuntabilitas. Dari segi efisiensi, anggaran negara jangan terlalu besar untuk menyelenggarakan negara, kemudian dari segi kepentingan bisnis semuanya menjadi lebih lancar, efisien sehingga setiap orang akan terdorong menjadi entrepreneur.

Tapi kalau berpikirnya sangat sederhana, semua orang terdorong hanya menjadi public servant. Atau menjadi pegawai negeri karena mengharapkan ada pensiun. Ada, apa namanya, ada keuntungan gaji dan selain itu, indahnyanya kekuasaan. Itu fenomena-fenomena di mana masyarakat belum begitu menjelma menjadi masyarakat informasi. Tapi kalau masyarakat sudah semakin cerdas, maka yang terjadi adalah kita semua terdorong untuk berusaha berbisnis, negara melancarkan perizinan, negara mengefisiensikan semuanya, sehingga dengan berbisnis, kita akan menjadi lebih sejahtera.

Artinya, kita masih dalam staging, masih emerging presence, kemudian baru interaksi. Tetapi sesungguhnya, kita harusnya menuju kepada bagaimana integrasi bisnis dan government serta masyarakat mandani itu, bukan hanya dalam exchanging information, pelayanan publiknya, tetapi bagaimana harmoni ketiga hal ini mampu mendorong kita untuk bisa bertransformasi dari negara yang berkembang menjadi negara yang modern.

Memang setelah reformasi, keterbukaan informasi publik mendorong kita semua untuk bisa menjadi lebih cerdas. Tetapi informasi itu ada yang negatif, ada yang positif. Orang ada yang cerdas dan tidak cerdas. Tidak cerdas akibatnya jadi tukang, apa namanya, pengolah berpikir negatif alias memfitnah, mencela orang lain. Sementara kalau kita bilang informasi itu maju, maka kita dengan mengolah informasi yang disediakan oleh negara, itu bisa kita olah untuk memajukan competitive advantage bisnis kita.

Nah di sini, hubungan interaksi, kehadiran pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat mandani secara network presence, artinya integrasi itu terjadi. Dalam hubungan yang vertikal maupun yang horisontal. Diharapkan dengan penyelenggaraan seperti itu, sistem e-government akan mendorong masyarakat kita menjadi lebih aktif, partisipasi masyarakat. Ingat, kalau kita bicara good electronic governance, atau lebih umumnya

gini lah, good and clean government. Itu kan akan bicara soal transparansi dan akuntabilitas, ada staging berikutnya lagi, interaksi yang menjadi lebih baik. Kita akan bahas lagi dalam materi berikutnya.

#### Video 4: Fungsi dan Tujuan e-Government

Pemirsa IndonesiaX, bagaimana sebelumnya pada awal perkuliahan, saya sempat sampaikan, ada pendekatan socio-techno business perspective. E-government juga diharapkan untuk menjawab hal yang namanya, bukan hanya evolusi masyarakat, tapi pengharapan masyarakat. Sebelumnya kita sudah bahas, ada desakan globalisasi, ada pendekatan tentang aspek keuangan yang lebih efisien, ada perubahan masyarakat menjadi masyarakat informasi, tapi lalu bagaimana dengan harapan-harapan yang diminta oleh masyarakat?

Semakin dekat pemerintah dengan masyarakatnya, maka masyarakat lebih gampang untuk menyampaikan permasalahannya dan pemerintahnya lebih cepat, lebih responsif. Karena telah menjadi semakin terintegral antara administrasi-administrasi negara tersebut dan hubungan yang menjadi efisien, yang lebih dekat.

Dengan kata lain, telah berubah dari bentuk yang negative feedback semula, menjadi positive feedback. Komunikasi yang baik antara warga negara dengan pemerintahnya adalah mengubah yang namanya celaan publik, marahan publik, marahnya warga negara menjadi tersenyum warga negara. Jadi sebagai administrasi negara, ya, kita harus hilangkan jauh-jauh sifat yang, maaf, lebih hanya berpikir kuasanya saja, tapi kita harus berpikir bagaimana melayani masyarakat dan mengubah dari masyarakat yang marah-marah, kemudian menjadi masyarakat yang tersenyum dan menghargai bagaimana si administrasi negara tadi telah menjawab kebutuhan masyarakatnya.

Sehingga tersinggungunya aparatur negara, dimaki-maki oleh warga negaranya, sekarang mah sudah tidak lagi jadi zaman. Dulu, setiap ada aparatur, masyarakat menunduk-menunduk, tapi sekarang mungkin berbeda lagi. Aparatur harus menyediakan diri, mukanya kalau perlu, disambitin telor oleh warga negaranya. Kenapa? Karena dia harus mempertanggungjawabkan, mengubah negara ini dari bentuk yang sangat birokratis tadi menjadi lebih friendly buat masyarakatnya.

Jadi berpikirnya bukan hanya masyarakat mendatangi negara, tapi negara mulai datang, mendatangi masyarakatnya, untuk memperbaiki hubungan itu. Artinya dari government driven, kemudian menjadi bentuk user centric oriented. Tidak hanya berpikir bahwa secara elektronik, masyarakat yang datang ke situs-situs pemerintah, tetapi bagaimana pemerintah membangun situs-situs yang lebih menjawab, lebih dekat dengan masyarakatnya.

Melengkapi paradigma telah bergesernya dari government oriented tadi, government oriented itu intinya kan gini, pemerintah dan administrasi negaranya, berupaya dari angle-nya, dari centric-nya, untuk membuat lebih efisien. Tapi dia belum berpikir kepada user centric. Gimana sih masyarakat ini harapannya kepada masyarakat? Ingat, ada ekspetasi masyarakat, kalau di negara yang berkembang, berpikir e-gov-nya begini, saya datang ke internet, mendatangi situs-situs pemerintah, saya download. Tapi di dalam negara yang semakin maju dan semakin dekat dengan masyarakat dan bangsanya, maka yang dia pikirkan gini, gimana caranya saya membuat sistem elektronik dimana masing-masing orang telah mendapat personalisasi dalam layanan pemerintahan tersebut.

Intinya apa? Begini, tentunya Anda sudah ikutan Yahoo dan lain sebagainya. Begitu anda masuk ke website itu, Anda punya laman sendiri. Lalu kemudian dari laman



tersebut, akan terlihat ada layanan-layanan apa. E-gov yang sangat user centric akan berpikir begini, saya sebagai warga negara kan sudah bayar pajak, saya lahir saja sudah ikut bayar utang negara. Lalu apa yang bisa diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya?

Maka yang terjadi adalah dia harus membuat saya seperti myegov.id. Misal, nama saya Edmon. Dibikin Edmon.id. Edmon.id itu akan ngapain? Saya bisa lihat di situ, oh, ini loh, saya dapat e-KTP, oh, saya bisa update, saya login, saya isi password, kemudian saya bisa ubah data saya, updating-nya. Saya berubah alamat, saya harus berikan tanggungjawab untuk mengupdate data tersebut.

Data pribadi saya, itu siapa saja yang ngecek, itu juga dapat dicek. Jadi intinya, negara memikirkan halaman, satu halaman buat saya dimana saya akan mendapatkan fasilitas. Jadi berbeda ya, cara berpikirnya. Kalo negara berkembang, yang dipikirin itu adalah situs-situs pemerintah tadi jalan menjadi lebih efisien, tapi saya datang ke situs-situs itu. Sementara kalau negara maju, dia berpikir saya bikin kamu tatap muka yang terdekat kepada kamu. Kemudian saya buat fitur-fitur yang dapat Anda akses. Anda bisa laporkan masalah keamanan, Anda bisa komplain masing-masing administrasi negara, dan sebagainya, dan sebagainya.

Itu intinya, mau tidak mau telah berubah. Yang tadinya sentral-sentral informasi itu, misalnya kementerian A, kementerian B, kementerian C, kementerian D, masing-masing berpikir sistem informasi pemerintahan dalam urusannya masing-masing. Itu menjadi apa? Menjadi semakin berinteraksi satu sama lain sehingga yang terjadi adalah data-data itu tidak perlu dipilah lagi. Tidak lagi terpilah menjadi silo-silo, dia harus menjadi semakin interaktif satu sama lain sehingga data si A yang pegang ya A, bisa dipake oleh B, bisa dipake oleh C.

Apa contoh paling mudah untuk kita lihat seperti itu? Coba Bapak, Ibu sekalian kalau sekarang kita datang ke kantor polisi, kita dimintai sidik jari, untuk ngurus SIM. Kalau kita pergi ke imigrasi, kita dimintai sidik jari lagi. Isi personal data lagi. Apa yang dilakukan? Mengulang lagi data-data yang kita telah berikan di SIM. Demikian pula pada saat kita mendapat KTP elektronik di kelurahan.

Idealnya apa? Idealnya enggak seperti itu. Idealnya cukup menyatakan begini. Kalau si Edmon ini pertama kali datang ke kementerian perdagangan dalam negeri, di situ dia lahir, di situ dia semua updating sebagai kehidupan pribadinya dalam administrasi penduduk, maka dengan sendirinya, kalau besok saya pergi ke kepolisian untuk mengurus SIM, saya cuma tinggal menyebutkan nomor induk kependudukan saya. Kemudian saya login, saya katakan Bapak sudah bisa akses data pribadi saya. Atau saya katakan begini, "Pak, Bapak bisa cek NIK saya ini, kemudian Bapak bisa ambil data pribadi."

Artinya saya setuju untuk data itu boleh diperiksa. Atau saya mengurus lagi ke pajak. Pajak nanya lagi, "Edmon, bagaimana?" Saya nggak perlu isi data lagi. Saya sebutkan nomor ini, pajak langsung mengakses data di kependudukan. Demikian pula dengan imigrasi. Alangkah indahnya negeri ini bukan, kalau misalnya sistem elektronik tadi, yang tadinya pisah-pisah, itu jadi semakin menyatu.

Permira IndonesiaX sekalian, coba amati. Berapa anggaran negara yang keluar untuk belanja TIK? Berapa anggaran negara yang keluar untuk dia cuma berpikir ada email, email, email, email. Masing-masing nanti setiap organisasi punya anggaran TIK yang besar-besar. Padahal ada satu yang bisa disentralkan, yang bisa dibagi, di-share. Jangan-jangan itu lebih efisien buat negara. Aplikasi-aplikasi yang namanya sistem informasi perkantoran yang masing-masing itu, ketimbang kita harus belanja license perangkat-perangkat aplikasi e-gov yang dibuat oleh luar negeri. Engak ada gunanya.

Yang lebih bagus adalah kita membuat sistem elektronik yang menjawab kebutuhan kita sendiri. Bukankah teknologi yang baik itu adalah kita belanja, pemanfaatannya sesuai dengan diri kita. Bukan kita belanja tapi di-lead oleh style dari satu teknologi. Belanjalah teknologi sesuai kebutuhan.

Kita sudah membahas dua hal itu tadi. Bagaimana government driven berubah menjadi user centric, yang kemudian dari silo-silo resources menjadi sharing resources. Dan yang berikutnya, kita bicara soal pelayanan. Pelayanan yang tadinya cuma berpikir internet, diakses lewat internet, sekarang dengan berkembangnya teknologi, menjadi lebih ubiquitous services-nya.

Poinnya seperti apa? Dulu, nyalain komputer untuk melihat indonesia.go.id, informasi publik. Sekarang enggak dong. Saya punya mobile telephone, saya bisa baca di sini. Pelayanan-pelayanannya hampir sama dengan e-commerce ya. Masuk ke dalam situs belanja, sekarang kan kita sudah bisa lihat di application store. Intinya ubiquitous services, pelayanan itu tidak hanya tergantung pada suatu moda komunikasi tertentu tetapi juga semakin convergence, sesuai dengan komunikasi, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Sesuai juga dengan keterbatasan TIK di masing-masing daerah.

Jadi jangan paksakan orang menerima bantuan langsung tunai kalo dia harus punya handphone. Enggak, gimana caranya? Ada yang masyarakatnya masih belum tumbuh ya, situasi negaranya, situasi daerahnya juga, misalnya TIK infrastukturnya belum bagus, dia tetap harus menerima layanan negara dalam bentuk yang konvensional. Memaksakan setiap orang itu mendapatkan sesuatu secara elektronik, itu harus lebih realistis melihat kondisi lingkungannya. Kalau kondisi lingkungannya belum bisa, ya belum bisa.

Coba perhatikan beberapa tahun yang lalu, kita pernah melihat bahwa pemerintah daerah menggebu-gebu untuk tumbuhnya electronic voting. Tetapi faktanya mungkin tidak semua sampai ke daerah-daerah fasilitas infrastuktur teknologi informasi dan komunikasi itu. Kemudian pemerintahan di Jembrana, pemerintahan daerah Jembrana melakukan judicial review terhadap Undang-undang Pemerintahan Daerah dimana pada saat pemilukada, itu dikatakan bahwa yang namanya orang mengeluarkan, menyampaikan suara, dengan cara mencoblos kertas suara. Kalau sudah elektronik, apanya yang dicoblos lagi? Kan orang tinggal touch screen.

Di sini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah memberikan putusan yang namanya Conditionally Unconstitutional atau sesuatu dianggap inkonstitusional jika syaratnya terpenuhi. Misalnya masyarakat telah tumbuh berkembang, elektronik KTP telah bagus dan kemudian bisa dipakai ke mana-mana. Bisa dipakai untuk semua pemanfaatan, maksud saya.

Lalu sistem pemerintahan untuk e-voting juga sudah tersedia. Maka pada saat yang seperti itu, ketentuan Undang-undang yang menyatakan mencoblos suara dengan mencoblos surat, penyampaian suara dengan mencoblos surat, itu dianggap inkonstitusi dan masyarakat masuk ke dalam evolusi yang berikutnya yaitu menyelenggarakan suaranya, menyampaikan suaranya dalam pemilihan umum dengan elektronik atau yang disebut dengan electronic voting.

Jadi setidaknya-setidaknya kita akan melihat, selain kita bicara evolusi, tiga karakteristik hubungan telah mendesak perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, user centric, efisiensi finansial, dengan cara share resources. Lalu kemudian, interaktif dengan pengharapan masyarakat dalam satu pelayanan yang dapat diakses dari semua saluran komunikasi, semua saluran teknologi yang ada, sesuai dengan

karakteristik dan dinamika daerah masing-masing. Kita akan lanjut lagi materi berikutnya.

#### Video 5: Tantangan e-Government Indonesia

Peserta IndonesiaX, coba perhatikan. Jika kita terapkan sistem informasi pemerintahan itu dalam cara berpikir segitiga manajemen, dan juga bagaimana siklus data menjadi action itu, masih ingat? Materi yang pertama. Data berubah menjadi informasi, informasi menjadi knowledge, knowledge menjadi wisdom, wisdom kemudian menjadi action. Action kemudian menjadi data kembali.

Dengan wisdom, manajemen akan membuat satu keputusan, bukan? Decision, action dan data kembali. Katakanlah siklus tadi kita gambarkan dengan lingkaran, lalu segitiga manajemen dari lapisan yang paling bawah adalah operational, kemudian tactical, kemudian strategic. Jika kita klopkan di sana, maka dengan sendirinya, maka segitiga dalam lingkaran tadi dengan keberadaan sistem informasi atau sistem komunikasi elektronik yang terintegrasi baik vertikal maupun horizontal antara administrasi negara. Maka yang terjadi adalah top management negara ini, yang berada pada titik terakhir dari segitiga ini, akan ter-supply suatu data, dari bawah diolah oleh manajemen tengahnya menjadi informasi. Informasi dengan knowledge, kemudian menjadi satu kebijakan, maka siapapun pimpinan negara ini, akan mendapatkan segala sesuatu menjadi lebih clear.

Data diolah sampai kepada suatu kebijakan yang tepat dalam mengambil suatu putusan. Kemudian menjadi suatu action dan akan menjadi data kembali. Dengan terintegrasi baik vertikal horizontal terhadap sistem tadi, maka mutu pelayanan publik dan mutu administrasi pemerintahan akan mendekatkan pemerintah dengan bangsanya dan menjawab ekspektasi masyarakatnya.

Kita gali lagi berikutnya. Tantangan dari adanya e-Gov kalau kita lihat berdasarkan staging evolusi tadi, maka kita akan melihat sesuatu yang sangat menarik untuk dicermati. Pada saat sesuatu sistem seperti tadi, maka yang dibutuhkan adalah jaminannya interoperabilitas, hubungan antarkementerian yang terpadu, interoperabilitas sistem, perangkat, prosedur, data bahkan kepada responsibilitas dan liabilitas dari masing-masing itu dalam berkoneksi.

Peserta IndonesiaX sekalian, kalau kita lihat dari Emerging Presence, Enhanced Presence, kemudian sampai kepada interaction dan transactional, setidaknya-tidaknya jadi pertanyaan, pada saat sistem telah terhubung, bertransformasi, kemudian bisa berhubungan secara efektif dan efisien baik internal maupun eksternal, maka pertanyaan kita adalah sejauh mana kita berhasil mencegah risikonya, melindungi segala kemungkinan yang terjadi, terkait dengan kerahasiaan data. Perlindungan terhadap data pribadi penduduk dan juga rahasia negaranya.

Dengan kata lain, pada saat dia diimplementasikan, tercipta hubungan interstate atau interministerial-nya, kalau interstate-nya dimaksudkan biasanya kalau negara federal kan bentuknya adalah pemda-pemdanya saling terhubung, hubungan antar kementerian yang bagus. Interoperabilitasnya ada. Kemudian yang terjadi adalah, kalau terjadi sesuatu koneksi yang sudah sedemikian bagus, maka yang menjadi pertanyaan dari publik adalah sejauh mana keotentikan konten itu? Baik informasi publiknya maupun dokumen publiknya, bahkan sampai keamanan. Keamanan siapa? Keamanan data penduduk. Data pribadi setiap orang dan rahasia negaranya.

Karena rahasia negara itu merupakan competitive advantage dan juga penentu terhadap social order. International security menjadi bagian yang penting juga dalam



konteks berhubungan tadi. Jadi challenge kita, sejauh mana kita berhasil untuk menjelmakannya agar IT tadi mempererat keutuhan bangsa, mampu mendorong ekonomi, mampu menjaga kepentingan bangsa, itu tidaklah mudah.

Pembahasan isu tentang cyber security kita akan letakkan pada materi kita yang terakhir. Namun dalam konteks e-government, yang harus diwaspadai adalah pemeringkatan-pemeringkatan yang ada, apakah memang telah memperlihatkan indeks untuk information security pada suatu negara? Karena semakin open, mungkin semakin enak berinteraksi dengan yang lain. Tapi pada saat semakin open, semakin open tadi, apakah benar-benar menjelmakan bangsa itu menjadi pemenang dalam kompetisi globalnya?

Itu tidaklah mudah. Yang menarik, pembuatan indeks-indeks, baik dari United Nation maupun Waseda, ada pendekatan-pendekatan yang cukup berbeda di sana. Mari kita cermati dalam tayangan saya, khususnya pada tabel berikut ini.

#### Video 6: Penerapan e-Government di Luar Negeri

Kita cermati dua pendekatan indeks tadi, dari United Nations Index dengan Waseda Index. Dalam United Index, setidaknya-tidaknya ada tiga indikasi. Yang pertama, the Web Measures Index. Yang kedua, Telecommunication Infrastructure Index. Yang ketiga, the Human Capital Index. Dalam the Web Measures Index, yang diperhatikan adalah seberapa banyak, seberapa jauh, berapa besar yang berhasil dilakukan hubungan elektronik services tadi terhadap semua fungsi-fungsi kenegaraan. Semua layanan-layanan administrasi pemerintahan dan layanan publiknya. Jadi apa saja sih e-service yang bisa dilakukan, itu Web Measures Index. Dia ditentukan berdasarkan berdasarkan transactional atau pola networking dari pelayananan-pelayanan publik, yang dapat dilakukan dilakukan secara elektronik.

Lalu yang kedua adalah Telecommunication Infrastructure Index, intinya yang ingin dilihat adalah berapa jumlah saluran telekomunikasi, berapa banyak jumlah pemakai, kemudian berapa besar broadband-nya, berapa yang telah dijadikan aplikasi-aplikasi, berapa jumlah pemesanan aplikasi tersebut. Intinya adalah dalam Telecommunication Infrastructure, pendekatan jumlah kuantitatif ICT-nya.

Yang berikutnya adalah Human Index. The Human Capital Index itu ingin memperlihatkan sejauh mana hubungan antara sistem elektronik tadi dengan perkembangan hukum dan pertumbuhan ekonomi di negara itu. Setidaknya-tidaknya, semakin baik rasa perlindungan masyarakat, itu juga dipresentasikan dengan electronic system-nya.

Jadi UN Index berpikir kepada tiga hal, the Web Measures Index, Telecommunication Infrastructure Index, dan Human Capital Index. Lalu yang berikutnya adalah tentang Waseda Index. Setidaknya-tidaknya Waseda Index memiliki tujuh pendekatan. Yang pertama adalah tentang kesiapan network atau infrastruktur, yang mencakup tentang jumlah internet users, broadband subscribers, mobile cellular subscribers, dan PC users. Jadi jumlah pengguna internet, jumlah pengguna mobile.

Lalu manajemen, yang kedua, Management Optimization atau efisiensi dari resources yang ada. Itu termasuk kepada administrative and budgetary system. Administrasi dan sistem pembelanjannya. Lalu hal yang ketiga adalah tentang perangkat-perangkat antarmuka yang menghubungkan semua aplikasi tadi. Jadi pendekatannya functional application, termasuk pendekatan pembangunan hukumnya.

Lalu yang keempat adalah bicara tentang national portal. National portal atau homepage. Mencakup bagaimana navigasinya, interaktivitasnya, dan pendekatan-pendekatan teknis lainnya.

Yang berikutnya adalah government CIO atau peranan dari official informasi pemerintah yang tidak hanya berpikir tentang informasi publik tapi juga pada pemberdayaan sistem elektronik untuk kepentingan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Yang berikutnya adalah tentang sejauh mana e-Government itu dipromosikan kepada masyarakatnya sehingga dapat dipakai dan menciptakan hubungan yang lebih interaktif sehingga memberdayakan masyarakat. Lalu berikutnya adalah partisipasinya dengan sendirinya, e-Participation atau digital inclusion. Itu pendekatan antara UN Index dan Waseda Index.

Sebelum kita membahas lebih jauh bagaimana penerapan e-government di Indonesia, ada baiknya kita sedikit memperhatikan beberapa catatan perbandingan berikut ini. Coba perhatikan slide berikut. Pada saat kita bicara e-government di Belgia, ternyata e-government itu bicaranya bukan hanya tentang murni sistem informasi pemerintahan saja yang dia lihat, kotak-kotaknya, tapi ada pemberdayaan tentang kewajiban pemerintah untuk kesehatan masyarakat.

Ada e-health di sampingnya. Ada upaya secara sistematis program untuk mereduksi digital divide. Kemudian ada program untuk membuat transparent communication. Penyelenggaraan electronic identity yang lebih baik dan mensimplifikasi hubungan administrasi atau pekerjaan administratif.

Inti yang menarik begini, sebagaimana saya telah kemukakan sebelumnya, electronic identity itu menjadi penentu apakah e-gov suatu negara user centric atau tidak. Kalau saya mendapatkan electronic identity, katakanlah Indonesia dengan KTP elektronik, ternyata saya diberikan satu login, saya mempunyai halaman sendiri, khusus untuk saya misalnya Edmon.id, kemudian di situ saya mendapatkan fitur-fitur dari pemerintah, apa yang bisa saya, di-online-kan kepada saya, maka itu akan lebih membuat saya menjadi lebih dekat dengan pemerintahnya.

Dan hubungan-hubungan interaksi tadi niscaya akan melancarkan semua ekspektasi masyarakat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Sehingga trustworthiness-nya dan akuntabilitas sistem elektronik pemerintah, berikut rasa percaya saya sebagai warga negara kepada pemerintahnya, akan semakin meningkat pula.

Lihat pula dalam di slide berikutnya bagaimana fitur-fitur itu ditampilkan dan lebih jauh lagi dalam slide berikutnya, saya juga tampilkan bagaimana saya mempunyai my e-gov.id, misalnya kalau di Belgia ya, di Belgia itu menarik, anak kecil juga punya KTP. Dan dia sudah menggunakan digital identity. Kenapa? Karena dia kan 11 juta penduduknya, 11 juta penduduk juga, mungkin yang asli penduduknya kan cuma 8-9 juta. Yang dua juta lagi pendatang. Sehingga tidak begitu mahal buat pemerintah untuk menyiapkan itu.

Tapi Indonesia dengan keragaman karakteristiknya, dengan sebegitu besar jumlah penduduk, segitu besar jumlah pulau, rentang wilayah, itu tidak mudah. Apalagi kita belum begitu maju dan mempunyai anggaran yang cukup untuk itu. Tapi upaya pemerintah untuk meng-e-KTP-kan, membuat KTP secara elektronik buat masyarakatnya sudah bagus.

Lebih lanjut itu bisa dilihat juga pada paparan saya tentang online reporting untuk keamanan. Polisi memberikan fitur untuk kita, kita katakan sajalah, pemerintah memberikan fitur kepada rakyatnya untuk bisa melakukan online reporting yang terkait dengan keamanannya. Sehingga dengan mudah, segala keluhan, ketidakamanan itu dapat terselenggara dengan baik. Dibandingkan dengan Indonesia, sungguh miris. Untuk rasa aman saja kita sulit. Begitu ya. Mau usaha dikit, mau maju juga, besok-besok sudah ada ormas yang datang. Melanggar sedikit, sudah banyak yang potong-potong.

Ini tentunya akan berbanding lurus ya, apakah bisa nanti penerapan TIK itu memberdayakan masyarakat dan mengubah mentalitas birokrasinya. Karena kalau sistem elektronik sudah bagus, kalau mentalitas birokrasi jelek juga, tidak efektif penerapan e-government itu.